

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik seringkali dinilai menjadi tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan sumber kerugian (Baswir, 1999 dalam Yuliari, 2004). Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah saat ini semakin diperlukan terutama bagi para pendonor yang mendanai keuangan Indonesia. Pemerintah harus bisa transparan dalam menyajikan laporan keuangan karena pemerintah hanya mengendalikan sumberdaya, sedangkan kepemilikan dari sumberdaya tersebut di luar dari manajemen pemerintah (Partono, 2000 dalam Yuliari, 2004).

Informasi yang diberikan oleh pemerintah selain menjadi tolok ukur kinerja juga merupakan salah satu informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu dalam menyampaikan laporan keuangan ke publik, pemerintah harus dapat menjaga transparansi laporan keuangan. Dengan adanya tuntutan untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan tersebut, maka diharapkan dapat menjadi motivasi bagi organisasi yang terkait agar dapat meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

Dalam menyediakan laporan keuangan, seringkali laporan tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakainya. Salah satu permasalahannya adalah *expectation gap* yang

merupakan gambaran dari ketidakpuasan pembaca atau pengguna laporan keuangan (*stakeholder*) atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Yuliari, 2004). Dengan adanya *expectation gap* ini secara sederhana dapat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna potensial (*stakeholder*) laporan keuangan pemerintah.

Tujuan utama dengan sistem transparansi informasi yaitu agar kinerja suatu organisasi lebih efisien, mengurangi tindak kecurangan dan pemborosan serta dapat memacu kinerja sehingga khususnya sektor publik tidak dituding sebagai sumber kerugian oleh banyak pihak. Dengan adanya kenyataan bahwa pemerintah belum mampu membaca kebutuhan informasi bagi para *stakeholder* inilah yang sebenarnya merupakan bukti nyata bahwa kinerja pemerintah belum dapat dimaksimalkan. Dengan kata lain bahwa era transparansi belum dapat memacu kinerja sektor publik agar lebih menjadi pilihan utama bagi *stakeholder* dalam menentukan keputusan ekonomi yang akan diambil.

Penelitian di Malaysia menunjukkan hasil bahwa terdapat *expectation gap* antara pelaporan pemerintah pusat dengan permintaan *stakeholder* akan informasi keuangan pemerintah pusat (Thayib, 1994 dalam Yuliari, 2004). Penelitian Yuliari (2004) juga menunjukkan hasil yang serupa yaitu terdapat *expectation gap* antara pelaporan Pemerintah Pusat Indonesia dengan permintaan *stakeholder* akan informasi keuangan Pemerintah Pusat. Dengan

juga terdapat kemungkinan bahwa di pemerintah daerah terjadi *expectation gap*. Dengan melihat kenyataan bahwa masih adanya perbedaan penilaian dengan penilaian dengan harapan masyarakat tentang informasi keuangan yang disampaikan pemerintah, maka *expectation gap* merupakan topik yang cukup menarik untuk diteliti. Terlebih dengan adanya otonomi daerah, maka kinerja dan akuntabilitas masing-masing daerah akan lebih terlihat dari informasi keuangan daerah yang disampaikan ke masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam membaca kebutuhan informasi keuangan masyarakat akan dapat mengurangi *expectation gap* yang terjadi.

Informasi keuangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, tidak selalu mendapat yang tanggapan yang sama dari masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman dan pengetahuan mengenai laporan keuangan oleh masyarakat. Dari kelompok masyarakat yang berbeda akan muncul tanggapan dan pemahaman yang berbeda pula, sehingga penerapan standar penyusunan laporan keuangan publik harus benar-benar diterapkan. Dengan fenomena tersebut, maka *expectation gap* dapat terjadi pada berbagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan mereka akan laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah antara lain adalah: kelompok investor yaitu semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan investasi; aparatur pemerintahan;

Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, serta adanya bukti bahwa di Indonesia terutama di pemerintah pusat masih terjadi *expectation gap*, maka peneliti bermaksud mengembangkan penelitian sebelumnya yang meneliti laporan keuangan pemerintah pusat dengan mengambil obyek penelitian yang lebih khusus yaitu *expectation gap* pada pemerintah daerah dengan alasan bahwa pada prinsipnya laporan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* akan informasi keuangan dari pemerintah. Penelitian ini menguji apakah terdapat *expectation gap* pada laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul **“Perbedaan Penilaian dan Harapan *Stakeholder* Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan serta judul yang telah diambil, maka rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan penilaian dan harapan (*expectation gap*) pada kelompok investor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan penilaian dan harapan (*expectation gap*) pada

3. Apakah terdapat perbedaan penilaian dan harapan (*expectation gap*) pada kelompok pendidik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat perbedaan penilaian dan harapan (*expectation gap*) pada kelompok masyarakat umum terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah terdapat perbedaan penilaian dan harapan (*expectation gap*) pada seluruh *stakeholder* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Batasan Masalah

Sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan mempersempit obyek laporan keuangan yang akan diteliti, yaitu hanya terbatas pada laporan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan target populasi adalah *stakeholder* yang berkepentingan dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah perbedaan penilaian dan harapan (*expectation gap*) pada kelompok masyarakat investor, aparatur, pendidik non aparatur dan masyarakat umum terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu dapat mengetahui ada atau tidaknya perbedaan penilaian dan harapan (*expectation gap*) pada kelompok masyarakat investor, aparatur, pendidik non aparatur dan masyarakat umum terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi calon investor serta bagi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini selain dapat mengetahui ada atau tidaknya perbedaan penilaian dan harapan (*expectation gap*) pada kelompok masyarakat investor aparatur pendidikan non aparatur dan masyarakat umum terhadap laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Yogyakarta (DIY) sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi calon investor pada pemerintah Daerah Kabupaten Yogyakarta.